

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang terdiri dari beberapa elemen atau unsur yang berperan dalam pengembangan dan pelaksanaannya. Pariwisata memiliki peran penting bagi negara, terutama dalam meningkatkan devisa negara dan sektor lainnya. Menurut Muljadi (2016), pariwisata merujuk pada kegiatan wisata, yaitu aktivitas di mana seseorang melakukan perubahan tempat tinggal sementara. Perubahan tempat tinggal tersebut dilakukan untuk menikmati objek wisata yang menarik guna melepas kepenatan serta mencari suasana baru. Destinasi atau objek wisata adalah suatu tempat atau kawasan yang unik, menarik, dan dilengkapi dengan layanan yang memadai.

Pariwisata adalah salah satu sektor yang memiliki peran krusial dan strategis dalam pengembangan ekonomi. Pengembangan pariwisata perlu memperhatikan berbagai aspek penting, terutama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di suatu wilayah. Sesuai dengan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2009 (DPR-RI 2009) tentang kepariwisataan, sumber daya alam, flora dan fauna, peninggalan purbakala, sejarah, seni, dan budaya Indonesia merupakan aset dan modal penting untuk membangun sektor pariwisata, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keanekaragaman budaya dan keindahan alam di Indonesia menjadikan negara ini terkenal dengan objek wisata yang menarik dan perlu dikembangkan. Ada banyak

objek wisata menarik yang bisa dikunjungi, baik wisata buatan, wisata alam, maupun wisata budaya.

Kondisi industri pariwisata saat ini sedang mengalami perkembangan pesat sehingga pemerintah dan masyarakat sama-sama berusaha untuk meningkatkan fasilitas dan infrastruktur sebagai upaya untuk mendukung perkembangan pariwisata. Hal ini karena industri pariwisata mampu memberikan dampak positif bagi sektor-sektor lain, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Pertumbuhan industri pariwisata juga mampu meningkatkan pemasukan devisa negara dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jumlah kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara sangat berpengaruh terhadap pendapatan devisa negara. Data statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2021, jumlah kunjungan wisatawan domestik mencapai 603 juta kunjungan, sedangkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun yang sama mencapai 1,5 juta kunjungan. Sementara pada tahun 2022, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia meningkat menjadi 5,4 juta kunjungan (BPS, 2023).

Pariwisata memiliki potensi besar untuk meningkatkan devisa suatu negara, karena industri ini dapat menarik kunjungan wisatawan asing yang membelanjakan uang mereka di berbagai sektor ekonomi lokal. Mengakui pentingnya sektor ini, pemerintah berupaya untuk memperkuat dan mengembangkan pariwisata dengan menyediakan berbagai bentuk dukungan keuangan, seperti alokasi dana desa yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas pariwisata. Dengan

pengembangan sektor pariwisata yang terencana dan berkelanjutan, manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat sangat signifikan. Peningkatan jumlah wisatawan akan mendorong pertumbuhan usaha lokal, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat perekonomian nasional secara keseluruhan. Investasi dalam infrastruktur pariwisata juga akan memberikan dampak positif jangka panjang bagi kemajuan daerah-daerah wisata. Oleh karena itu, pemerintah terus berkomitmen untuk mendukung dan memfasilitasi perkembangan industri pariwisata sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi negara.

Jawa Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki daya tarik wisata yang sangat menonjol serta potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Provinsi ini telah menunjukkan keseriusan dalam mengembangkan sektor pariwisata melalui pengeluaran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2019 tentang Kepariwisata. Peraturan ini mencerminkan komitmen pemerintah provinsi dalam membangun industri pariwisata yang berkelanjutan dan terintegrasi. Jawa Tengah memiliki keanekaragaman daya tarik wisata yang luar biasa, yang mencakup warisan budaya yang kaya, sejarah yang mendalam, serta keindahan alam yang memukau. Mulai dari candi-candi megah seperti Borobudur dan Prambanan, hingga panorama alam pegunungan, pantai, dan danau yang mempesona, provinsi ini menawarkan beragam destinasi yang dapat menarik wisatawan domestik maupun internasional. Selain itu, seni dan budaya tradisional Jawa Tengah, seperti batik, gamelan, dan tari tradisional, juga menambah daya tarik tersendiri bagi para

pengunjung. Tabel 1.1 menggambarkan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Jawa Tengah sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Provinsi Jawa Tengah**

Tahun	Wisatawan		Jumlah Total
	M mancanegara	Domestik	
2018	677.168	48.943.607	49.620.775
2019	691.699	57.900.863	58.592.562
2020	78.290	22.629.085	22.707.375
2021	1.793	21.332.409	21.334.202
2022	144.429	44.805.075	44.949.504

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Dalam 2023 (diolah)

Pada Tabel 1.1 terlihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik di Jawa Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 dan 2021. Penurunan pada dua tahun tersebut disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang melanda berbagai wilayah. Namun, pada tahun 2022, jumlah kunjungan wisatawan melonjak tajam hingga mencapai 45.093.933 orang. Angka ini jauh melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebesar 11.530.429 wisatawan, dengan pencapaian mencapai 291 persen dari target. Kenaikan jumlah wisatawan pada tahun 2022 tidak terlepas dari meredanya penyebaran COVID-19 serta kuatnya daya tarik wisata Jawa Tengah yang terus menarik minat pengunjung.

Tingginya wisatawan di Jawa Tengah secara tidak langsung mendorong berbagai kota/kabupaten di Jawa Tengah untuk berlomba-lomba dalam meningkatkan sektor pariwisata, berikut akan disajikan kabupaten/kota dengan wisatawan terbanyak di Jawa Tengah.

**Tabel 1.2 Kabupaten dengan Jumlah Wisatawan Terbanyak di Jawa Tengah Tahun 2022**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Wisatawan</b>
Kabupaten Klaten	3.303.423
Kabupaten Magelang	1.889.177
Kabupaten Banyumas	1.795.352
Kabupaten Semarang	1.746.076
Kabupaten Purbalingga	1.695.084

Sumber : Buku Statistik Pariwisata Jawa Tengah, 2022 (diolah)

Berdasarkan Tabel 1.2 yang menyajikan kabupaten/kota dengan wisatawan terbanyak di Jawa Tengah tahun 2022 menunjukkan bahwa kabupaten Semarang termasuk dalam lima besar dengan jumlah kunjungan sebanyak 1,746,076 wisatawan. Pada peringkat kedua terdapat Kabupaten Magelang dengan jumlah kunjungan sebanyak 1,889,177 wisatawan, sedangkan kunjungan terbesar ada di Kabupaten Klaten sebanyak 3,303,423 wisatawan.

Kabupaten Semarang merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah wisatawan terbanyak di Jawa Tengah. Sektor pariwisata di Kabupaten Semarang memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, dengan slogannya sebagai INTANPARI yang menggabungkan Industri Pertanian dan Pariwisata. Obyek wisata di Kabupaten Semarang tersebar di sekitar Gunung Ungaran, Gunung Merbabu, Pegunungan Telomoyo, Gajah Mungkur, Gunung Mergi, serta di sekitar Rawa Pening. Posisi strategis Kabupaten Semarang membuka peluang besar bagi pengembangan sektor pariwisata. Beragam daya tarik wisata yang ada semakin meningkatkan potensi pariwisata Kabupaten Semarang.

Secara geografis, Kabupaten Semarang terletak di jalur pariwisata JOGLOSEMAR, dengan batas wilayah di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Kendal, serta di sebelah utara berbatasan dengan Kota Semarang. Secara astronomis, Kabupaten Semarang berada di antara garis 110,14 dan 54,750 BT hingga 110,39,03,00 BT dan antara 70,30 dan 570 LS hingga 70,300 LS. Secara administratif, Kabupaten Semarang dengan ibu kotanya di Kota Ungaran terdiri dari 19 kecamatan, dengan populasi usia produktif sekitar 540.675 jiwa dari total populasi sekitar 841.135 jiwa. Luas wilayah Kabupaten Semarang adalah 95.020,674 hektar, yang terletak strategis di jalur ekonomi, pertanian, dan pariwisata, menjadikannya potensial sebagai pusat rekreasi dengan daya saing tinggi.

Pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Semarang didasarkan pada Peraturan Bupati No. 111 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Semarang untuk periode 2010 – 2030. Sebagai sebuah sistem yang kompleks, pariwisata bersifat multidimensi dan memerlukan interaksi serta kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat setempat. Sektor pariwisata memerlukan strategi pengembangan yang terencana dan sistematis. Rencana ini harus mencakup analisis mendalam mengenai potensi wisata yang dimiliki daerah, identifikasi pasar sasaran, serta pengembangan produk wisata yang unik dan menarik. Pola pengembangan yang terencana akan memastikan bahwa potensi wisata di Kabupaten Semarang dapat

dikembangkan secara optimal sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi daerah tersebut.

Sektor pariwisata juga menjadi salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Tengah, berikut akan disajikan pendapatan pada sektor pariwisata pada kabupaten/kota dengan wisatawan terbanyak di Jawa Tengah.

**Tabel 1.3 Jumlah Pendapatan pada Sektor Pariwisata Menurut Kabupaten dengan Wisatawan Terbanyak di Jawa Tengah Tahun 2022**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Pendapatan</b>
Kabupaten Klaten	39,266,623,580
Kabupaten Magelang	11.532.533.243
Kabupaten Banyumas	16.632.399.500
Kabupaten Semarang	25,253,716,027
Kabupaten Purbalingga	26,941,677,175

Sumber : Buku Statistik Pariwisata Jawa Tengah, 2022 (diolah)

Berdasarkan Tabel 1.3 kabupaten dengan pendapatan sektor pariwisata tertinggi adalah Kabupaten Klaten, yaitu sebesar Rp 39,266,623,580. Sedangkan Kabupaten Semarang menempati posisi kedua kabupaten dengan pendapatan tertinggi dari sektor wisata sebesar Rp 25,253,716,027. Dari data tersebut menunjukkan Kabupaten Semarang sudah baik dalam pengelolaan potensi wisata, terbukti dengan pendapatan yang besar dari sektor pariwisata. Kabupaten Semarang memiliki beberapa objek wisata alam yang berpotensi untuk pengembangan jangka panjang, seperti Taman Rekreasi Bukit Cinta, Pemandian Muncul, Air Terjun Kalipancur Wana Wisata Penggaron, Air Terjun Semirang, Wana Wisata Umbulsongo, Taman Wisata Kopeng, Wisata Alam Merbabu, Desa Wisata Sidomukti, Sendang Senjoyo, Air Terjun Curug Lawe, Sendang Kanoman

Air Terjun Curug, dan Air Terjun Kalipancur. Objek-objek wisata ini hingga saat ini masih belum berkembang secara maksimal. Setiap tahunnya, berbagai jenis objek wisata di Kabupaten Semarang yang menjadi daya tarik bagi wisatawan terus ditingkatkan baik dalam hal jumlah maupun kualitasnya. Jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata yang ada di Kabupaten Semarang pada tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini:

**Tabel 1.4 Jumlah Wisatawan Kabupaten Semarang Tahun 2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Wisatawan</b>
2018	3.381.790
2019	2.868.323
2020	1.185.788
2021	1.285.587
2022	1.746.157

Sumber : Buku Statistik Pariwisata, 2022 (diolah)

Berdasarkan Tabel 1.4 dapat dilihat jumlah wisatawan di Kabupaten Semarang yang fluktuatif. Dari tahun 2018 jumlah wisatawan semakin menurun hingga tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 dan tahun 2022 pariwisata Kabupaten Semarang mulai bangkit hingga jumlah wisatawan semakin meningkat. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023, turunnya jumlah wisatawan disebabkan oleh belum optimalnya promosi dan pemasaran wisata yang terdapat di kabupaten Semarang serta sebagai dampak dari adanya pandemi covid-19. Saat ini pemerintah masih berusaha untuk memulihkan kembali sektor pariwisata.

Saat ini, minat wisatawan mulai bergeser dari sekadar menikmati keindahan alam menuju pengalaman wisata yang melibatkan interaksi langsung dengan



masyarakat lokal. Wisatawan mencari pengalaman yang lebih autentik dan bermakna, yang memungkinkan mereka untuk memahami budaya, tradisi, dan kehidupan sehari-hari dari komunitas yang mereka kunjungi. Dengan perubahan preferensi wisatawan ini, konsep pengembangan wisata desa mulai mendapatkan perhatian lebih. Desa Wisata adalah pengembangan sistem kepariwisataan suatu daerah yang memiliki keunikan tersendiri dan masyarakatnya mempunyai kearifan lokal. Desa wisata menyajikan wisata yang kental dengan atraksi budaya, keindahan alam dan keunikan daerah masing-masing. Salah satu daya tarik dalam desa wisata, yaitu terdapat kekayaan budaya atau biasa disebut dengan wisata budaya.

Wisata budaya merupakan kunjungan wisata untuk melihat aktivitas khusus yang berkaitan dengan tradisi, religi, atau lain sebagainya yang dilakukan oleh sekelompok individu di suatu wilayah. Adanya wisata budaya dapat menambah pengetahuan mengenai budaya di Indonesia dengan melihat langsung serta mempelajari budaya yang terdapat dalam desa wisata. Banyaknya manfaat yang didapat dari adanya desa wisata, menjadikan pengembangan desa wisata di Indonesia semakin digalakkan. Berkembangnya desa wisata akan menarik wisatawan untuk berwisata di desa tersebut sehingga perekonomian di suatu daerah meningkat dan tercipta pemerataan pembangunan di masing-masing daerah.

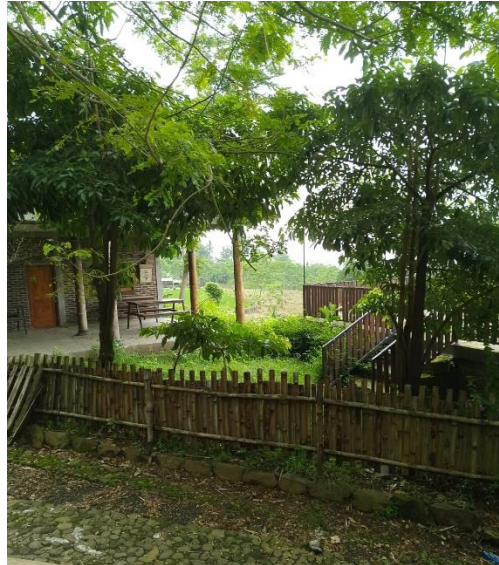
Kabupaten Semarang saat ini memiliki 70 desa wisata, menjadikannya kabupaten dengan jumlah desa wisata terbanyak di Indonesia. Salah satu desa wisata di Kabupaten Semarang adalah Desa Gogik, yang terdiri dari dua dusun: Dusun Gogik

dan Dusun Gintungan. Desa Gogik terletak di Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Desa ini memiliki luas sekitar 18.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas wilayah: sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Candirejo, sebelah timur dengan PTPN IX, sebelah selatan dengan Desa Gebugan, dan sebelah barat dengan Kelurahan Langensari. Desa Gogik berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut, dengan suhu rata-rata harian 27°C, menjadikannya daerah yang sangat sejuk. Secara demografis, Desa Gogik terdiri dari 2 RW dan 16 RT, dengan rincian Dusun Gogik memiliki 9 RT dan Dusun Gintungan memiliki 7 RT. Jumlah penduduk di desa ini adalah 3.504 jiwa, tersebar dalam 988 kepala keluarga.

Pengembangan Desa Wisata Gogik menghadapi tantangan yang signifikan, yaitu kurangnya sinergi antara Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Gogik dalam hal pembinaan dan pelatihan. Untuk mengembangkan desa wisata secara efektif, sangat penting adanya pembinaan dan pelatihan yang optimal. Pokdarwis, sebagai institusi lokal yang terdiri dari para pelaku kepariwisataan, memiliki peran kunci dalam menjamin keberhasilan dan keberlanjutan desa wisata. Mereka bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan potensi wisata desa, serta memastikan bahwa pengalaman yang ditawarkan kepada wisatawan berkualitas tinggi dan autentik.

Peran Pokdarwis dalam pengembangan Desa Wisata Gogik juga masih belum maksimal. Tanpa dukungan dan bimbingan yang memadai dari Dinas Pariwisata, Pokdarwis menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan strategi pengembangan

yang efektif. Pelatihan yang kurang optimal mengakibatkan terbatasnya pengetahuan dan keterampilan anggota Pokdarwis dalam mengelola desa wisata, mulai dari pemasaran, pelayanan wisatawan, hingga pelestarian budaya dan lingkungan.



**Gambar 1. 1 Tempat Wisata Embung Sukoponco yang Kurang Tertata**

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2024 (diolah)

Dilihat pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa kondisi salah satu tempat wisata, yaitu Embung Sukoponco yang saat ini kurang tertata dan terbengkalai. Kurangnya kebersihan di area wisata dibuktikan dengan banyaknya rumput yang tidak dibersihkan, sehingga hal tersebut dapat mengurangi estetika tempat wisata. Kurangnya pemeliharaan tempat wisata menjadi faktor yang merugikan dalam pengembangan Desa Wisata Gogik.

Ketidaksinergian peran antara Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Gogik dapat memengaruhi terhadap pembangunan pengembangan Desa Wisata Gogik. Dalam hal ini, pembangunan fasilitas pengembangan Desa Wisata Gogik yang diberikan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang dapat dikatakan belum optimal. Beberapa faktor yang mendukung penilaian ini termasuk kurangnya infrastruktur yang memadai, keterbatasan aksesibilitas, dan minimnya promosi wisata yang dilakukan.



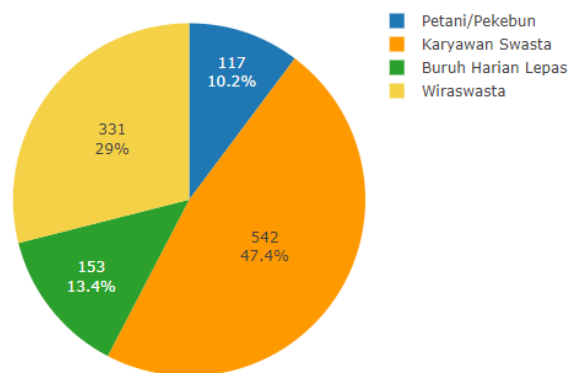
**Gambar 1. 2 Fasilitas Kurang Memadai di Desa Wisata Gogik**

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2024 (diolah)

Dilihat pada gambar 1.2 menunjukkan bahwa terdapat fasilitas yang ada pada desa wisata gogik masih ditemukan rusak, kerusakan tersebut tampak pada kursi yang ada pada area desa wisata dan sampah yang berserakan disekitarnya. Terlebih lagi

sebagian besar para pengunjung mengunjungi Desa Wisata Gogik untuk dapat berfoto sehingga setiap sudut pada Desa Wisata Gogik perlu perbaikan dan kebersihan.

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Gogik berfungsi sebagai wadah masyarakat untuk memberdayakan mereka agar serta dalam pengelolaan Desa Wisata Gogik dengan standar yang memadai. Namun, masih terdapat kendala dalam peran yang dimainkan oleh Kelurahan Gogik, BUMDEs dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Gogik dalam memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan Desa Wisata Gogik yang belum optimal. Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Gogik masih kurang. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan Gambar 1.3 yang menunjukkan jenis pekerjaan masyarakat Desa Gogik sebagai berikut :



**Gambar 1.3 Jenis Pekerjaan di Desa Gogik**

Sumber : Data Pemerintah Desa Gogik, 2024 (diolah)

Dapat dilihat melalui Gambar 1.3 bahwa profesi terbanyak masyarakat Desa Gogik sebesar 47,4% adalah karyawan swasta. Dilihat dari persentase profesi karyawan swasta, hal tersebut juga menjadi dasar akibat masyarakat tidak terlalu

berpartisipasi dalam pengembangan desa wisata gogik. Kurangnya partisipasi masyarakat karena rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sektor pariwisata. Masyarakat Desa Gogik melihat bahwa keuntungan yang didapat dari pengembangan desa wisata itu tidak pasti sehingga mereka lebih memilih untuk fokus pada pekerjaan yang sudah pasti menghasilkan.

Pengembangan Desa Wisata Gogik pada dasarnya harus diimbangi dengan promosi pariwisata. Sejauh ini pemanfaatan teknologi sebagai alternatif media promosi Desa Wisata Gogik belum berjalan secara optimal sehingga pengunjung kesulitan dalam mencari informasi Desa Gogik. Promosi Desa Wisata Gogik tergolong rendah jika dibandingkan dengan desa wisata lain yang ada di Kabupaten Semarang yang gencar melakukan promosi melalui *website* dan akun media sosial. Dalam hal ini meskipun proses promosi sepenuhnya dari pemerintah, seharusnya pihak Pokdarwis Desa Gogik harus tetap gencar dalam melakukan promosi pariwisata Desa Wisata Gogik.



**Gambar 1. 4 Promosi Wisata Melalui Media Sosial Instagram**

Sumber : Diolah melalui Media Instagram, 2024

Berdasarkan postingan yang diunggah pada Media Sosial Instagram, postingan terakhir diunggah pada tahun 2022 yang menunjukkan bahwa promosi wisata saat ini sudah tidak gencar dilakukan. Promosi harus terus dilakukan karena perkembangan media massa memiliki dampak signifikan pada perkembangan industri pariwisata. Banyak individu kini telah beralih ke media sosial sebagai sarana untuk mendapatkan informasi sehingga perlu dorongan dari Pokdarwis Desa gogik untuk dapat meningkatkan kunjungan Desa Wisata Gogik melalui branding media massa, seperti media sosial maupun *website* resmi Desa Wisata Gogik.

Potensi wisata yang begitu besar belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh warga sekitar karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang potensi wisata yang dimilikinya. Yuwono & Dwijanto (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “IBM Pengembangan Desa Wisata Gogik Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang”, menemukan sebuah masalah yaitu masih kurangnya partisipasi masyarakat menjadi salah satu penghambat dalam mengembangkan potensi wisata yang ada. Sebagian masyarakat kurang tertarik dalam mengembangkan Desa Wisata Gogik karena keuntungannya yang tidak pasti.

Fasilitas dan infrastruktur di tempat wisata Desa Gogik masih terbatas, sehingga banyak orang di luar Gogik belum mengetahui arah jalan menuju destinasi wisata tersebut. Minimnya penunjuk arah, jalan yang belum memadai, dan kurangnya fasilitas pendukung seperti area parkir, toilet umum, serta tempat istirahat membuat akses menuju lokasi wisata kurang nyaman bagi pengunjung. Peran media massa dalam mempromosikan berbagai destinasi wisata di Desa Gogik juga masih kurang optimal.

Informasi mengenai potensi wisata di desa ini belum tersebar luas sehingga banyak orang di luar wilayah Semarang dan sekitarnya belum mengenal Desa Wisata Gogik. Padahal, promosi melalui media massa dan *platform* digital sangat penting untuk menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri. Kendala ini sangat disayangkan mengingat saat ini pemerintah pusat sedang gencar-gencarnya mengangkat dan mempromosikan potensi wisata di seluruh Indonesia. Inisiatif pemerintah pusat untuk meningkatkan pariwisata nasional seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Desa Gogik. Sayangnya, keterbatasan sarana prasarana dan kurangnya promosi mengakibatkan desa ini belum dapat memaksimalkan potensinya sebagai destinasi wisata unggulan.

Pembangunan dan pengembangan pariwisata membutuhkan peran aktif *stakeholder*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nugroho et al. (2016) berjudul *Peran Stakeholders dalam Pengembangan Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang*, menekankan keterlibatan penting *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Peran *stakeholders* sangat penting dalam merumuskan kebijakan dan rencana sistematis, seperti pembangunan infrastruktur yang dipimpin pemerintah dan peningkatan kualitas tenaga kerja di sektor pariwisata. Namun, beberapa hambatan telah diidentifikasi, seperti konflik di antara anggota Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) dan rendahnya partisipasi masyarakat lokal di desa wisata.



Dalam penelitian yang dilakukan oleh Paristha et al. (2022) berjudul *Peran Stakeholder dalam Pengembangan Desa Wisata Kerta Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar*, berdasarkan penelitian tersebut ditemukan bahwa peran dan fungsi *stakeholders* dalam pengembangan Desa Wisata Kerta di Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, sangatlah penting. Masing-masing *stakeholder* memiliki peran yang unik, dan ketika mereka bekerja sama dalam kolaborasi dengan tujuan tertentu, hasil yang optimal dapat dicapai. Setiap *stakeholder* memiliki dampak yang signifikan dalam pengelolaan pariwisata di Desa Kerta. Oleh karena itu, untuk mempercepat pengembangan Desa Wisata Kerta, diperlukan kerja sama yang erat antara kelima pihak tersebut, dengan mempertimbangkan kemampuan dan keterbatasan masing-masing *stakeholder* guna menciptakan sinergi yang efektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini sangat penting untuk dilakukan. Dengan demikian, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Peran *Stakeholders* dalam Pengembangan Desa Wisata Gogik di Kabupaten Semarang”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Belum sinerginya peran *stakeholders* antara Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang dalam melakukan pembinaan dan pelatihan pengembangan desa wisata terhadap Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Gogik.
2. Belum sinerginya peran Kelurahan Gogik, BUMDEs dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam pemberdayaan masyarakat Desa Gogik.

3. Kurangnya kesadaran masyarakat Gogik untuk mengembangkan potensi wisata yang ada.
4. Media promosi wisata yang masih belum optimal sehingga desa wisata yang terekspose masyarakat hanya desa wisata yang memang sudah mumpuni.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Siapa saja *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Gogik di Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana peran *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Gogik di Kabupaten Semarang?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Mengidentifikasi *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Gogik di Kabupaten Semarang.
2. Menganalisis peran *stakeholders* dalam pengembangan Desa Wisata Gogik di Kabupaten Semarang.

### **1.5 Kegunaan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Akademis**

- 1) Memberikan kontribusi pada pengembangan Ilmu Kebijakan Publik, khususnya dalam hal jaringan *stakeholders*.

- 2) Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai jaringan *stakeholders* dalam pengembangan Desa Wisata Gogik.

## **2. Manfaat Praktis**

- 1) Bagi Penulis

Memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan penulis mengenai analisis peran *stakeholders* khususnya pengembangan Desa Wisata Gogik. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam menambah wawasan penulis mengenai peristiwa atau fenomena yang terjadi saat ini.

- 2) Bagi Universitas

Memperkaya kumpulan tinjauan pustaka sebagai bahan bacaan mahasiswa UNDIP tepatnya jurusan Administrasi Publik mengenai peran *stakeholders* dalam pengembangan desa wisata.

- 3) Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang dalam membuat kebijakan pengembangan Desa Wisata Gogik.

- 4) Bagi Masyarakat

Memberikan informasi dan pengetahuan mengenai peran mereka dan memperluas peran serta masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Gogik.

## 1.6 Kajian Teori

Kajian teori merupakan sistem konsep yang berisikan teori-teori dan model-model dari para tokoh dengan cara memahami dan menganalisis suatu fenomena untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu peristiwa terjadi. Kajian teori sebagai landasan fundamental guna membimbing peneliti dalam menemukan jawaban dari fenomena secara sistematis dan bertanggung jawab.

### 1.6.1 Penelitian Terdahulu

**Tabel 1.5 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dian Herdiana, 2019	Peran Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan ( <i>library research</i> )	Penelitian menunjukkan bahwa kesuksesan desa wisata bergantung pada keterlibatan penuh masyarakat dalam seluruh prosesnya. Masyarakat perlu aktif dalam dua peran utama: pertama, sebagai subjek yang memiliki hak untuk menentukan arah perkembangan desa wisata. Kedua, sebagai obyek yang menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pengembangan desa wisata.

2	Ni'mah A.Hidayah, Simon S. Hutagalung, dan Dedy Hermawan, 2019	Analisis Peran <i>Stakeholder</i> Dalam Pengembangan Wisata Talang Air Peninggalan Kolonial Belanda Di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu.	Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata Talang Air meliputi masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Mereka telah berkolaborasi dalam berbagai aspek pengembangan, baik dalam pembangunan fisik maupun nonfisik. Komunikasi dan kerjasama antara para pemangku kepentingan tersebut tergolong baik, yang mempercepat proses implementasi pengembangan pariwisata Talang Air.
3	Yusuf Surya Novanda, 2019	Peran Aktor dalam Pengelolaan Goa Jlamprong Sebagai Daya Tarik Desa Wisata Mojo di Ngeposari Semanu Gunungkidul.	Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks keterlibatan aktor dalam pengembangan pariwisata, pihak dinas pariwisata dan pengembang swasta berperan sebagai pemain utama, sementara masyarakat menjadi pengatur konteks, pemerintah desa berperan sebagai subjek, dan pemerintah kecamatan sebagai pengumpul pendapat. Adapun beberapa hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan lahan parkir, aksesibilitas yang kurang, ketiadaan <i>homestay</i> ,

				kurangnya penanda arah, minimnya upaya pemasaran dan promosi, fokus utama masyarakat Mojo pada kerajinan, rendahnya minat wisatawan, dan kendala anggaran.
4	Grace Ginting, Kismartini, Tri Yuniningsih, dan Teuku Afrizal, 2021	Analisis Peran <i>Stakeholders</i> dalam Pengembangan Pariwisata Siosar	Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian menegaskan bahwa peran <i>stakeholder</i> dalam pengembangan kawasan wisata Siosar belum signifikan. Siosar merupakan kawasan wisata yang memiliki potensi alam, agrowisata, dan lainnya yang harus dikembangkan dengan baik. Masing-masing <i>stakeholder</i> menjalankan perannya, namun belum memberikan hasil yang optimal, masih adanya ketimpangan peran dan kendala yang dihadapi menunjukkan bahwa <i>stakeholder</i> belum sepenuhnya menjalankan perannya, baik peran pemerintah, swasta hingga masyarakat.
5	Riska Destiana, Kismartini, dan Tri Yuningsih, 2020	Analisis Peran <i>Stakeholders</i> Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat	Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan	Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengembangan destinasi pariwisata halal di Pulau Penyengat melibatkan pemangku kepentingan dengan pendekatan pentahelix, yang terdiri dari kalangan akademisi,

		Provinsi Kepulauan Riau	data menggabungkan wawancara secara daring, dokumentasi dan observasi.	pelaku bisnis, komunitas, pemerintah, dan media massa. Ada 38 pemangku kepentingan yang terlibat, yang dibagi menjadi pemangku kepentingan primer, kunci, dan sekunder. Peran mereka tercermin dalam fungsi sebagai pencipta kebijakan, koordinator, fasilitator, pelaksana, dan akselerator kegiatan. Interaksi antara pemangku kepentingan diamati dari berbagai bentuk dan aktivitas yang terjadi..
6	Feronica Simanjorang, Luchman Hakim, dan Sunarti, 2020	Peran <i>Stakeholder</i> dalam Pembangunan Pariwisata di Pulau Samosir	Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, serta menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi	Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan pariwisata di Pulau Samosir terkait dengan warisan budaya suku Batak, yang membuat peran masyarakat setempat sangat penting dalam menjaga kelangsungan budaya lokal. Namun, peneliti tidak menemukan kerjasama yang kuat antara pemerintah, masyarakat setempat, dan sektor swasta dalam pengembangan pariwisata di Pulau Samosir. Sebaliknya, masyarakat setempat lebih memilih untuk mengelola pariwisata secara mandiri.
7	Shendy Yasmin	Analisis Peran Aktor dalam	Metode penelitian yang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada

	Arafat, Budi Puspoo Priyadi, dan Amni Zakarsyi Rahman, 2022	Pengembangan Obyek Wisata Umbul Susuhan di Desa Manjungan Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten	digunakan adalah deskriptif kualitatif.	beberapa pihak atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan objek wisata Umbul Susuhan, yang terdiri dari tiga kategori: Pemangku Kepentingan Primer, Pemangku Kepentingan Kunci, dan Pemangku Kepentingan Sekunder. Dalam pengembangan objek wisata Umbul Susuhan, BUMDes Mahanani bertindak sebagai Pembuat Kebijakan, Pelaksana, dan Koordinator utama. Pemangku kepentingan kunci terdiri dari Pemerintah Desa Manjungan dan Dispermasdes Kabupaten Klaten. Pemangku kepentingan sekunder mencakup Pemerintah Kabupaten, Kecamatan Ngawen, sektor swasta sebagai Fasilitator, serta BPD, Ketua RW, Ketua RT, PKK, dan Karangtaruna. Namun, peran beberapa pemangku kepentingan belum optimal karena pandemi COVID-19.
8	Annatasya Yunita Nugroho, Amni Zarkasyi Rahman, dan	Peran <i>Stakeholders</i> dalam Pengembangan Desa Wisata	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada lima peran yang dimainkan oleh pemangku kepentingan dalam pengembangan Desa



	Kismartini, 2022	Nongkosawit Kota Semarang		Wisata Nongkosawit, yaitu sebagai pembuat kebijakan, koordinator, fasilitator, pelaksana, dan akselerator. Para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit meliputi POKDARWIS Kandang Gunung, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Desa Nongkosawit, Bappeda Kota Semarang, Disporapar Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Jawa Tengah, Universitas Negeri Semarang, para wisatawan, dan masyarakat Nongkosawit.
9	Ni Putu Tiya Paristha, I Nyoman Sukma Arida, dan Gde Indra Bhaskara, 2022	Peran <i>Stakeholder</i> dalam Pengembangan Desa Wisata Kerta Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar	Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemangku kepentingan telah berperan, namun keterlibatan dunia usaha dan media masih relatif rendah. Model kolaboratif dirumuskan dengan menempatkan masyarakat sebagai inti pembangunan dan didukung oleh akademisi, pemerintah, bisnis, dan media sebagai aktor pendukung.
10	Kusnul Rohmania dan Sri Juni Woro Astuti, 2022	Analisis Peran Aktor Penta Helix dalam Pengembangan Wisata Taman	Metode penelitian yang digunakan adalah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemangku kepentingan dalam pengembangan wisata

		Anggrek Sememi Ex Lokalisasi Moroseneng Kota Surabaya.	pendekatan kualitatif.	Taman Anggrek belum mencapai tingkat optimal. Pemerintah mendominasi dalam berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pembangunan, penganggaran, hingga promosi. Sementara itu, peran akademisi dan swasta masih belum signifikan. Peran media massa terlihat tidak terstruktur, sedangkan komunitas berperan sebagai penghubung dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
--	--	--	------------------------	--

Sumber : Diolah dari berbagai jurnal

Penelitian sebelumnya menjadi salah satu landasan bagi penulis, yang mencakup berbagai teori dan temuan dari hasil penelitian sebelumnya dapat menjadi data pendukung. Melalui analisis hasil penelitian tersebut, penelitian ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, baik dari segi teori peran *stakeholders* maupun lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan teori peran *stakeholders* yang dikemukakan oleh Nugroho et al. (2016) sebagai kerangka teoritisnya. Selain itu, lokasi penelitian yang dipilih adalah Desa Wisata Gogik, yang terletak di Kabupaten Semarang.

### 1.6.2 Administrasi Publik

Istilah Administrasi Publik menggambarkan bagaimana pemerintah sebagai entitas utama yang memiliki kekuasaan aktif dan selalu mengambil

inisiatif dalam mengatur dan membuat keputusan serta langkah-langkah yang dianggap penting atau baik bagi masyarakat. Pada pandangan ini, masyarakat dianggap sebagai pihak yang pasif, kurang mampu, dan diharapkan untuk tunduk serta menerima segala aturan yang ditetapkan oleh pemerintah (Keban, 2008).

Selanjutnya, konsep Administrasi Publik menurut Keban (2008) menunjukkan orientasi yang sangat kuat pada pemberdayaan masyarakat, yang lebih menekankan pada kemandirian dan kemampuan masyarakat karena pemerintah memberikan kesempatan tersebut kepada mereka. Dalam konteks ini, pemerintah lebih memprioritaskan "pemberdayaan" di mana upaya pemerintah difokuskan untuk memfasilitasi agar masyarakat dapat mengatur kehidupan mereka sendiri tanpa bergantung sepenuhnya pada pemerintah. Dengan menerapkan pendekatan ini, partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga pelaksanaan dan evaluasi hasil. Sementara itu, peran pemerintah menjadi lebih sebagai fasilitator, yang memungkinkan pemerintah untuk lebih berkonsentrasi pada urusan-urusan negara yang memiliki dampak strategis.

Sementara itu, menurut Henry (dalam Keban, 2008), Administrasi Publik adalah kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek yang bertujuan untuk mempromosikan pemahaman tentang peran pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah. Selain itu, tujuannya juga

adalah untuk mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi Publik berusaha untuk menginstitutionalkan praktik-praktik manajemen yang sesuai dengan efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik

Dari beberapa definisi administrasi publik yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan serangkaian proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat. Penelitian ini menjadi titik fokus dalam ranah administrasi publik karena mengkaji dinamika keterlibatan pemangku kepentingan dalam Pengembangan Desa Wisata Gogik di Kabupaten Semarang. Khususnya, penelitian ini dilakukan oleh pihak-pihak yang aktif terlibat dalam administrasi publik seperti Pemerintah Desa dan masyarakat. Pada dasarnya, ini berfungsi sebagai studi kasus dalam ilmu administrasi publik, yang menunjukkan peran organisasi publik yang mewujudkan karakteristik birokrasi.

### **1.6.3 Paradigma Administrasi Publik**

Bidang studi Administrasi Publik adalah domain yang dinamis, terus mengalami perkembangan dan transformasi seiring berjalannya waktu, sebagai respons terhadap berbagai tantangan yang muncul. Evolusi ini tercermin dalam

munculnya paradigma baru yang mencerminkan pandangan para ahli tentang peran serta tantangan Administrasi Publik dalam menghadapi berbagai masalah yang timbul. Paradigma-paradigma ini tidak hanya mencerminkan pemikiran terbaru dalam bidang administrasi publik, tetapi juga memperhitungkan konteks sosial, politik, dan ekonomi yang terus berubah di sekitarnya. Dengan demikian, Administrasi Publik menjadi tidak hanya sebuah bidang studi yang luas, tetapi juga sebuah arena untuk eksplorasi ide dan solusi inovatif untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik. Nicholas Henry (dalam Keban, 2008) mengemukakan 6 paradigma didalam disiplin ilmu administrasi publik yaitu sebagai berikut:

a. Paradigma dikotomi antara politik dan administrasi (1900-1926)

Asumsi dasar dari paradigma ini adalah konsep pemisahan antara urusan politik dan administratif sebagai cara untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Woodrow Wilson pada akhir abad ke-19. Dalam aspek politik, fungsi utamanya adalah perumusan kebijakan, yang melibatkan penentuan tujuan dan prioritas suatu negara oleh para politisi yang dipilih melalui proses demokratis. Keputusan politik memberikan legitimasi kepada kebijakan yang diadopsi, dengan memastikan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan keinginan dan kepentingan rakyat. Di sisi lain, aspek

administrasi berfokus pada pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

b. Prinsip-prinsip administrasi (1927-1937)

Prinsip-prinsip administrasi yang memiliki cakupan universal, dapat diterapkan di berbagai konteks dan waktu, merupakan konsep yang telah diterima secara luas. Gullick dan Urwick (1937) mengemukakan tujuh prinsip administrasi yang terkenal dengan akronim POSDCORB, yang mencakup *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *staffing* (penyusunan staf), *directing* (pengarahan), *coordinating* (koordinasi), *reporting* (pelaporan), dan *budgeting* (penyusunan anggaran). Paradigma ini menekankan bahwa prinsip-prinsip administrasi, seperti yang diuraikan dalam POSDCORB, merupakan fondasi yang kuat untuk efektivitas manajemen di berbagai lingkungan organisasi.

c. Administrasi publik sebagai ilmu politik (1950-1970)

Dalam paradigma ini, terdapat upaya untuk memperbaiki hubungan konseptual antara administrasi negara dan politik. Administrasi publik dipandang sebagai bagian dari ilmu politik, di mana perhatian utamanya terfokus pada struktur dan fungsi birokrasi pemerintahan, sementara fokus lainnya menjadi kurang jelas. Hal ini menyebabkan administrasi publik mengalami krisis identitas, karena

dominasi yang kuat dari ilmu politik dalam domain administrasi publik.

Administrasi publik sebagai ilmu administrasi (1956-1970)

Istilah administrasi di sini mengacu pada segala studi yang berkaitan dengan struktur dan manajemen organisasi, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program-program dengan lebih akurat. Dalam konteks ini, penekanan lebih diberikan pada fokus daripada lokusnya.

d. Administrasi Publik sebagai ilmu administrasi publik (1970-sekarang)

Paradigma ini memberikan landasan teoritis dan praktis untuk memahami dan meningkatkan cara organisasi publik beroperasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Hal ini menjadikan administrasi publik tidak hanya sebagai praktik manajemen, tetapi juga sebagai bidang studi yang terus berkembang dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan lebih responsif. Fokus administrasi publik dalam paradigma ini adalah pada teori organisasi dan kebijakan publik, sedangkan lokusnya adalah pada isu-isu dan kepentingan publik.

e. *Governance* (1990-sekarang)

Paradigma ini menekankan perubahan dalam cara pemerintah dan administrasi dipersepsikan. Menurut J.S. Endarlin, istilah "governance" digunakan sebagai pengganti "government", yang mencerminkan penggunaan berbagai otoritas politik, ekonomi, dan

administratif dalam mengelola masalah-masalah negara. Istilah ini secara spesifik mencerminkan perubahan peran pemerintah dan penyedia layanan, dari yang semula sebagai pemberi layanan menjadi penyelenggara atau fasilitator, serta pergeseran dalam kepemilikan, yaitu dari kepemilikan oleh negara menjadi kepemilikan oleh masyarakat.

Dari keenam paradigma administrasi publik di atas, penelitian mengenai peranan *stakeholders* dalam pengembangan desa wisata ini masuk dalam paradigma keenam, yaitu *Governance*. Hal ini sesuai dengan konsep bahwa implementasi tata kelola yang baik membutuhkan keterlibatan semua elemen dalam masyarakat dan dapat diwujudkan dengan segera ketika pemerintah mendekatkan diri kepada yang diperintah. Elemen-elemen dalam kebijakan publik termasuk di dalamnya adalah aktor yang terlibat, oleh karenanya, penelitian mengenai peranan *stakeholders* implementasi kebijakan yang tidak lagi berpusat hanya pada pemerintah saja, tetapi melibatkan aktor lain, seperti masyarakat, swasta, dan lain-lain sangat relevan dengan paradigma keenam ini, yaitu Paradigma *Governance*.

#### **1.6.4 Manajemen Publik**

Manajemen sebagai cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis alasan dan cara manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan, berupaya membuat kerja sama lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Manajemen



publik, sebagai satu disiplin ilmu manajemen, fokus pada pengaturan dan implementasi kebijakan di sektor publik untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan di sektor publik.

Keban (2008), mengungkapkan bahwa aspek manajemen berkaitan dengan penerapan prinsip – prinsip manajemen, yang kemudian dijadikan kebijakan publik. Manajemen fokusnya adalah pada penggunaan model, metode, teori, teknik, dan strategi untuk mencapai tujuan dengan cara yang efisien dan efektif. Kualitas suatu kebijakan dapat dipertanyakan apabila pelaksanaannya tidak didukung oleh metode dan teknik implementasi yang memadai, sehingga resiko kebijakan menjadi tidak berarti.

Pengembangan objek wisata tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada satu pihak, melainkan harus melibatkan sejumlah aktor atau *stakeholders*. Para *stakeholders* dapat berasal dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, masyarakat, kelompok advokasi, lembaga pendidikan, dan organisasi komunitas. Dalam konteks ini, fungsi manajemen publik, seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap masyarakat dalam mendukung perkembangan pariwisata, menjadi salah satu wujud pelaksanaan kebijakan yang dilakukan pemerintah.

#### **1.6.5 Stakeholders**

*Stakeholders* atau pemangku kepentingan merupakan suatu sistem yang berdasar pada pandangan tentang organisasi dan lingkungannya, yaitu tentang

sifat saling mempengaruhi secara komprehensif dan dinamis. *Stakeholders* dan organisasi merupakan dua hal yang saling berpengaruh, hal ini dikarenakan adanya keterkaitan sosial antara keduanya, yakni yang berbentuk tanggung jawab serta akuntabilitas. Oleh karenanya, organisasi memiliki akuntabilitas terhadap *stakeholders*nya.

Maryono (dalam Handayani, 2014) menjelaskan bahwa *stakeholders* dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu :

a. *Stakeholders* Kunci

*Stakeholders* ini merujuk pada individu atau organisasi yang memiliki wewenang hukum untuk membuat keputusan. Mereka yang bertanggung jawab atas pelaksanaan suatu program biasanya termasuk dalam kategori *stakeholders* kunci.

b. *Stakeholders* Primer

Kelompok ini mencakup individu atau organisasi yang secara langsung terpengaruh baik secara positif maupun negatif oleh rencana tertentu dan memiliki kepentingan langsung terhadap kegiatan tersebut. *Stakeholders* primer memiliki pengaruh dan kepentingan penuh dalam setiap tahap kegiatan.

c. *Stakeholders* Sekunder

*Stakeholders* ini mengacu pada organisasi atau individu yang tidak secara langsung terlibat dalam rencana tertentu tetapi memiliki tingkat

perhatian yang tinggi terhadap proses pengembangan. *Stakeholders* sekunder bertindak sebagai pendukung atau fasilitator dalam pengembangan kegiatan dan memengaruhi pengambilan keputusan. Kelompok ini dapat mencakup sektor swasta, LSM, serta akademisi.

#### **1.6.6 Peran *Stakeholders***

Peran seringkali dikaitkan dengan pemain, perilaku atau tindakan, dan tanggung jawab. Menurut Suhardono (dalam Hia, 2019) teori peran berbicara mengenai kesatuan dari beberapa teori maupun orientasi ilmu dimana peran merupakan karakterisasi yang dibawa oleh *stakeholders* ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Dalam pengertian ini, konsep peran menurut Suhardono lebih ditekankan pada ‘posisi, yang kemudian istilah posisi ini dikaitkan dengan *status, niche, dan office*.

Peranan menurut Hanafie (2016) diartikan sebagai tindakan seseorang untuk melaksanakan hak serta tanggung jawab yang disesuaikan dengan kedudukannya. Adapun menurut Nugroho et al. (2016), *stakeholders* dalam program pembangunan dapat diklasifikasikan berdasar pada perannya, yakni :

1. *Policy Creator*, yakni *stakeholders* yang mempunyai peran sebagai penentu kebijakan dan pengambil keputusan.

2. Koordinator, yakni *stakeholders* yang mempunyai peran untuk mengkoordinasikan *stakeholders* lainnya yang ikut berperan atau terlibat dalam suatu program pembangunan.
3. Fasilitator, yakni *stakeholders* yang mempunyai peran untuk memfasilitasi kebutuhan kelompok sasaran.
4. Implementer, yakni *stakeholders* yang melaksanakan kebijakan yang mana terdiri atas kelompok sasaran.
5. Akselerator, yakni *stakeholders* yang mempunyai peran untuk percepatan dan kontribusi bagi program agar dapat berjalan sesuai dengan sasaran.

Peran *stakeholders* dalam suatu organisasi atau proyek bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong dan penghambat. Menurut pendapat Purwanto dan Sulisyastuti (2012) ada beberapa nilai yang memengaruhi *stakeholders* dalam jaringan, komunikasi yang terbentuk serta bentuk penyerahan sumber daya antar *stakeholders* dalam jaringan. Faktor penghambat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang berpengaruh dan memberikan kontribusi negatif dalam pengembangan pengembangan desa wisata, yaitu :

1. Nilai bisa berasal dari individu, organisasi, professional, legal dan kepentingan umum yang ada dan dibawa oleh masing-masing *stakeholders*;

2. Komunikasi, artinya seberapa intens/sering antar *stakeholders* saling berkomunikasi, berkoordinasi dan bekerja sama baik lisan maupun tertulis dalam rangka mencapai tujuan/kepentingan bersama;
3. Kepercayaan, artinya kepercayaan dari masing-masing *stakeholders* dalam menjalin hubungan dengan *stakeholders* lain untuk mencapai tujuan atau kepentingan yang sama;
4. Sumber kebijakan, artinya kebijakan atau regulasi yang memfasilitasi hubungan antar *stakeholders* atau jaringan yang terbentuk untuk mewujudkan tujuan bersama.

Dalam penelitian kualitatif konsep teori dan asumsi bersifat sementara sesuai dengan cara kerja metode kualitatif yang sifatnya induktif. Setelah penelitian dimungkinkan menemukan hal-hal yang baru diluar apa yang sudah diuraikan.

### **1.6.7 Pengembangan Desa Wisata**

Pengembangan merupakan proses yang melibatkan serangkaian langkah atau tindakan yang bertujuan untuk mendorong kemajuan, pertumbuhan, dan perluasan. Konsep ini mencakup upaya untuk merangsang inovasi, menciptakan hal-hal baru, atau mengelola gagasan-gagasan yang bertujuan untuk mengubah dan memperluas Desa Wisata agar menjadi lebih berkembang. Dengan melibatkan pengaturan ide-ide dan rencana-rencana yang

terarah, pengembangan Desa Wisata tidak hanya berfokus pada perubahan, tetapi juga pada penciptaan peluang baru yang dapat meningkatkan daya tarik, infrastruktur, dan pelayanan bagi pengunjung serta masyarakat lokal. Dalam konteks ini, pengembangan Desa Wisata bukan hanya sekadar mencakup pertumbuhan fisik, tetapi juga aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan sehingga menciptakan lingkungan yang ramah dan berkelanjutan bagi wisatawan serta meningkatkan kesejahteraan bagi penduduk lokal. Oleh karena itu, pengembangan Desa Wisata membutuhkan kerja sama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan pelaku usaha, untuk mencapai visi dan tujuan yang diinginkan.

Desa Wisata adalah sebuah kawasan pedesaan yang mempunyai potensi dan daya tarik wisata yang unik dan khas. Keunikan ini tidak hanya terlihat dari karakteristik fisiknya yang mencerminkan kehidupan pedesaan yang autentik, tetapi juga dari aspek kehidupan sosial masyarakatnya yang khas. Potensi ini diwujudkan melalui pengembangan berbagai fasilitas pendukung wisata yang bertujuan untuk menarik minat wisatawan dengan cara yang menarik dan alami. Dengan pengelolaan dan perencanaan yang baik, lingkungan di Desa Wisata diatur secara harmonis untuk menciptakan suasana yang ramah dan menarik bagi para wisatawan. Melalui upaya ini, Desa Wisata menjadi destinasi yang siap menyambut dan mengakomodasi kebutuhan pengunjung dengan baik. Di dalam lingkungan yang teratur dan terjaga dengan baik ini, diharapkan para

wisatawan dapat menikmati pengalaman yang berkesan dan memuaskan. Dengan menarik kunjungan wisatawan, diharapkan akan tercipta peluang-peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat, seperti melalui penjualan produk lokal, penyediaan jasa wisata, dan lain sebagainya. Melalui implementasi konsep ini, diharapkan bahwa Desa Wisata dapat menjadi contoh bagi pengembangan pariwisata berkelanjutan yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan memanfaatkan potensi wisata yang dimiliki secara optimal dan bertanggung jawab, Desa Wisata memiliki potensi untuk menjadi destinasi yang menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara, sambil memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat setempat.

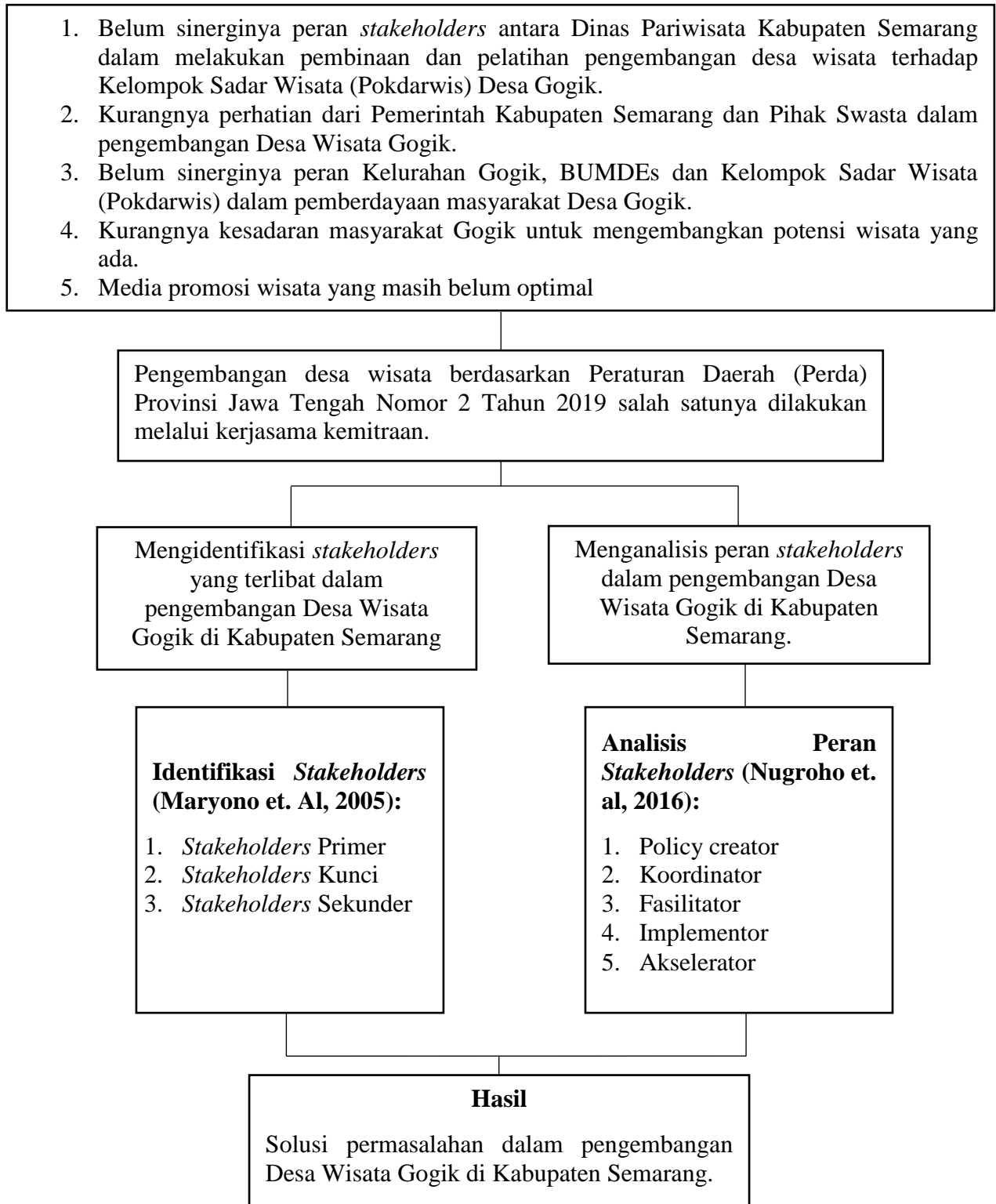
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merespon dengan baik masukan maupun ide untuk mendukung pengembangan desa wisata. Hal tersebut dibuktikan dengan disahkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah. Perda ini juga membahas mengenai pentingnya pengembangan desa wisata. Selain itu, pengembangan

desa wisata juga dijelaskan lebih rinci dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah.

Pengembangan Desa Wisata harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat dalam hal perencanaan sehingga dampaknya dapat terkontrol. Diperlukan perencanaan strategis yang memperhitungkan pendekatan yang tepat serta model-model pengembangan desa yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan geografis desa tersebut. Saat mengembangkan potensi wisata di suatu wilayah, diharapkan dampak yang timbul dapat diminimalkan sebisa mungkin, baik yang bersifat positif maupun negatif.



**Gambar 1. 5 Kerangka Berpikir**



## 1.7 Operasionalisasi Konsep

*Stakeholders* mencakup individu, organisasi, atau kelompok—terdiri dari laki-laki dan perempuan—yang memiliki kepentingan, berpartisipasi aktif, atau terkena dampak (baik positif maupun negatif) oleh kegiatan program pembangunan. *Stakeholders* dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategorisasi. Dalam penelitian menggunakan teori identifikasi *stakeholders* dimana terdapat tiga indikator, yaitu :

1. *Stakeholders* Primer
2. *Stakeholders* Kunci
3. *Stakeholders* Sekunder

Peran dapat diartikan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ada karena suatu jabatan tertentu. Tugas, fungsi dan posisi serta kedudukan *stakeholders* berdasarkan peran yang dimiliki setiap *stakeholders* adalah :

- a) *Policy creator*: *Stakeholders* yang berperan mengambil dan menentukan kebijakan.
- b) *Coordinator*: *Stakeholders* yang berperan mengkoordinasikan *stakeholders* lain.
- c) *Facilitator*: *Stakeholders* yang berperan memfasilitasi kelompok sasaran.
- d) *Implementer*: *Stakeholders* yang melaksanakan kebijakan.
- e) *Accelerator*: *Stakeholders* yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi pada pelaksanaan program.

*Stakeholders* dalam melakukan proses pengembangan Desa Wisata Gogik tidak dapat dikatakan mudah secara keseluruhan, mengingat dalam proses pelaksanaan seringkali dihadapi berbagai tantangan. Maka dalam pengembangan Desa Wisata Gogik perlu diketahui faktor penghambat yang memengaruhi peran *stakeholders* dalam melakukan pengembangan Desa Wisata Gogik. Adapun komponen dari faktor penghambat peran *stakeholders*, sebagai berikut :

- 1) Nilai
- 2) Komunikasi
- 3) Kepercayaan
- 4) Kebijakan

**Tabel 1. 6 Fenomena Penelitian**

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala yang diamati	Informan					
			1	2	3	4	5	6
Identifikasi <i>Stakeholders</i>	<i>Stakeholders</i> Primer	- <i>Stakeholders</i> yang memiliki kepentingan langsung dan paling signifikan						
		- <i>Stakeholders</i> yang memiliki kepentingan langsung dan paling signifikan oleh adanya suatu kebijakan	√	√	√			
		- <i>Stakeholders</i> sekunder tidak terlibat secara						

	<i>Stakeholders</i> Sekunder	langsung dalam pengambilan Keputusan - <i>Stakeholders</i> yang tidak mempunyai kepentingan, tetapi memiliki kepedulian	√	√		√		
	<i>Stakeholders</i> Kunci	- <i>Stakeholders</i> yang memiliki pengaruh signifikan dan kepentingan yang tinggi - <i>Stakeholders</i> yang memiliki kepentingan atau dampak yang tidak langsung	√	√		√		
Peran <i>Stakeholders</i>	<i>Policy creator</i>	- Kejelasan adanya kebijakan - Posisi dan kedudukan setiap <i>stakeholders</i> dalam penyusunan kebijakan - Tugas dan fungsi <i>stakeholders</i>	√	√	√			
	Koordinator	- Pihak mana yang menjadi koordinator utama - Tugas dan fungsi <i>stakeholders</i> - Proses pelaksanaan koordinator	√			√	√	

		- Bentuk Kerjasama yang dilakukan						
	Fasilitator	- Pihak mana yang menjadi fasilitator utama - Tugas dan fungsi <i>stakeholders</i> - Bentuk fasilitas yang disediakan - Fasilitas yang disediakan sudah memenuhi kriteria atau belum	√	√	√			
	Implementer	- Pihak mana yang menjadi fasilitator utama - Tugas dan fungsi <i>stakeholders</i> - Bentuk fasilitas yang disediakan - Fasilitas yang disediakan sudah memenuhi kriteria atau belum	√		√	√		
	Akselerator	- Pihak mana yang menjadi fasilitator utama - Tugas dan fungsi <i>stakeholders</i> - Bentuk fasilitas yang disediakan			√	√	√	√
	Faktor Penghambat : 1. Nilai	- Peran <i>stakeholders</i> sebagai penggerak dalam pengembangan Desa Wisata Gogik						

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai individu, hubungan Kerjasama <i>stakeholders</i> dalam pengembangan Desa Wisata Gogik</li> <li>- Nilai professional, kesesuaian sasaran dari adanya suatu kebijakan yang berlaku</li> <li>- Nilai legalitas, adanya regulasi atau aturan yang mendukung aspek kerjasama <i>stakeholders</i></li> <li>- Nilai organisasi, kemampuan dan komitmen <i>stakeholders</i> dalam melaksanakan kebijakan</li> </ul>	√	√	√	√	√	√
	2. Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat frekuensi komunikasi antara <i>stakeholders</i> dengan entitas</li> <li>- Kualitas hubungan <i>stakeholders</i> saling memahami tujuan, visi, dan misi dari suatu kebijakan</li> <li>- Kemampuan <i>stakeholders</i></li> </ul>	√			√	√	√

		dalam menyelesaikan adanya suatu konflik						
	3. Kepercayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Stakeholders</i> terkait aktif berkolaborasi maupun berpartisipasi dalam suatu kebijakan yang dapat membangun kepercayaan</li> <li>- <i>Stakeholders</i> terkait dapat memberikan akses terbuka dalam memberikan informasi</li> <li>- Kemampuan <i>stakeholders</i> dalam mematuhi kesempatan atau perjanjian yang telah dibuat</li> </ul>	√	√	√			
	4. Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Stakeholders</i> mampu menjalankan suatu kebijakan sesuai dengan kebijakan atau aturan yang berlaku.</li> <li>- Pengukuran kinerja dan pelaporan berkaitan dengan kebijakan</li> </ul>	√		√	√		

Sumber : Diolah oleh peneliti, (2023)

Keterangan :

1. Informan 1 : Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Semarang
2. Informan 2 : Kepala Desa Gogik
3. Informan 3 : Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gogik
4. Informan 4 : Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Wisata Gogik
5. Informan 5 : Masyarakat Desa Gogik 1
6. Informan 6 : Masyarakat Desa Gogik 2

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Tipe Penelitian**

Sugiyono (2013) mengemukakan bahwa metode penelitian adalah pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, menganalisis data, dan menjawab pertanyaan penelitian. Adapun tipe metode penelitian terbagi 2 (dua) yaitu :

#### **1. Metode Kualitatif**

Metode kualitatif adalah suatu langkah dalam proses penggalan data dan perumusan hipotesis untuk memahami suatu fenomena berdasarkan konvensi-konvensi metodologis yang ada, dengan tujuan memahami permasalahan sosial. Dalam metode ini untuk menjelaskan suatu fenomena dijabarkan melalui analisis data yang bersifat naratif atau deskriptif.

#### **2. Metode Kuantitatif**

Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang mengandalkan fakta konkret, digunakan untuk menyelidiki populasi atau sampel tertentu,



menggunakan instrumen penelitian untuk mengumpulkan data, serta menganalisis data secara statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, tujuan peneliti menggunakan metode kualitatif untuk mengeksplorasi serta menggali informasi dari individu maupun kelompok yang terlibat, mencari data spesifik, mengajukan pertanyaan, menganalisis secara induktif, dan menafsirkan makna dari data – data yang sudah didapat tersebut.

Pasolong (2015) menguraikan bahwa terdapat tiga jenis penelitian kualitatif, yakni penelitian deskriptif, eksplanatori, dan eksploratif. Dari ketiga jenis tersebut, penulis memilih untuk menerapkan pendekatan deskriptif. Alasan di balik pilihan ini adalah karena peneliti ingin memberikan gambaran dan melakukan analisis terperinci mengenai *stakeholders* dalam kajian ini. Dengan menerapkan metode Kualitatif Deskriptif, penulis berupaya menyajikan sebuah gambaran komprehensif mengenai fenomena yang berkaitan dengan perkembangan Desa Wisata Gogik di Kabupaten Semarang.

### **1.8.2 Situs Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Gogik, yang terletak di Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk

mengeksplorasi peran *stakeholders* atau pihak-pihak terkait dalam proses pengembangan Desa Wisata Gogik di Kabupaten Semarang.

### **1.8.3 Subjek Penelitian**

Dalam konteks penelitian ini, istilah “subyek penelitian” mengacu pada kelompok atau individu yang bertugas memberikan informasi yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Dalam lingkup penelitian ini, informasi akan bersumber dari berbagai entitas yang terafiliasi dengan konteks penelitian. Dalam penelitian ini, sumber-sumber yang akan digali informasinya ialah Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, Kepala Desa Gogik, BUMDes Gogik, Pokdarwis Desa Gogik, dan Masyarakat Desa Gogik.

### **1.8.4 Jenis Data**

Menurut Lofland (2006), data kualitatif dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti kata-kata, dokumen, serta informasi-informasi terkait lainnya. Konsep ini melibatkan pengelompokan jenis data menjadi beberapa kategori, termasuk kata-kata yang disampaikan secara lisan atau tertulis, tindakan yang diamati atau dilakukan oleh subjek penelitian, sumber data tertulis seperti buku atau laporan, gambar atau foto yang memuat informasi visual, dan jenis data lainnya yang relevan. Sumber data dapat dipahami sebagai asal atau sumber dari mana data tersebut diperoleh, baik melalui pengamatan langsung, interaksi dengan responden, atau melalui media atau perantara lainnya. Dengan demikian, pemahaman

mengenai beragam sumber data ini memberikan kerangka kerja yang penting bagi peneliti dalam proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data kualitatif.

#### **1.8.5 Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, sebagai berikut :

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Untuk memperoleh data ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang dianggap memiliki keterkaitan atau keterlibatan dalam penelitian.
2. Data Sekunder, data didapatkan melalui studi kepustakaan atau bahan lainnya yang berhubungan dengan pengembangan Desa Wisata Gogik di Kabupaten Semarang.

Peneliti akan berusaha untuk mengumpulkan kedua jenis data tersebut. Data primer akan diperoleh melalui proses wawancara langsung dengan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pengembangan Desa Wisata. Sementara itu, data sekunder akan diperoleh melalui telaah literatur, yang mencakup referensi dari buku, laporan, dan penelitian sebelumnya.

#### **1.8.6 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2013), penting untuk memperhatikan teknik pengumpulan data dalam proses penelitian. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mendalam atau fakta-fakta yang belum terungkap secara menyeluruh, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih baik terhadap suatu fenomena sosial.
2. Dokumentasi, melibatkan pengumpulan data dari berbagai bahan tertulis yang relevan dengan penelitian.
3. Observasi, merupakan suatu metode pengumpulan data secara sistematis dengan cara mengamati langsung subjek penelitian.
4. Studi Pustaka, adalah metode pengumpulan data yang mencakup eksplorasi informasi relevan dari literatur ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian.

### **1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Creswell (2003) menjelaskan beberapa teknik analisis data dalam penelitian kualitatif sebagai berikut :

a. Pengolahan dan Persiapan data

Bagian ini melibatkan kegiatan seperti transkripsi, pemindaian materi, penyiapan data lapangan, serta pengorganisasian dan seleksi data sesuai dengan jenisnya tergantung pada informasi yang terkandung di dalamnya.

b. Membaca Data secara Keseluruhan

Langkah ini penting untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh atau gambaran umum tentang data secara keseluruhan.

c. Melakukan analisis dan *coding* terhadap data

Pada tahap ini, dilakukan proses pemberian kode pada materi atau informasi untuk memprosesnya menjadi segmen-segmen yang dapat digunakan dalam analisis lebih lanjut.

d. Melakukan *coding*

Proses koding dilakukan untuk mengelompokkan data ke dalam berbagai tema atau kategori yang dapat dieksplorasi lebih lanjut untuk analisis lebih mendalam.

e. Menjelaskan dan mendeskripsikan tema melalui kalimat-kalimat atau laporan kualitatif.

Metode umum untuk menyajikan temuan analisis sering kali bersifat naratif. Metode ini meliputi pemberian penjelasan tentang rangkaian peristiwa, tema, dan keterhubungan antar peristiwa dalam bentuk narasi yang kohesif.

### **1.8.8 Kualitas Data**

Teknik pemeriksaan merupakan strategi yang melibatkan unsur-unsur eksternal dari data yang telah diperoleh, unsur tersebut digunakan sebagai alat pemeriksaan dan perbandingan. William Wiersma, seperti yang dijelaskan (dalam Sugiyono, 2013) menguraikan beberapa teknik triangulasi sebagai berikut :

a. Triangulasi sumber merupakan suatu metode validasi yang dilakukan dengan memeriksa informasi dari berbagai sumber yang berbeda.

- b. Triangulasi teknik merupakan cara untuk memvalidasi data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang sama, namun dengan pendekatan yang berbeda.
- c. Triangulasi waktu merupakan pendekatan untuk menguji validitas data dengan membandingkan data yang sama dari sumber yang sama, namun pada periode waktu yang berbeda.

Untuk memastikan validitas hasil penelitian, penulis akan menjalankan proses uji validitas dengan menerapkan teknik triangulasi sumber. Pendekatan ini akan melibatkan perbandingan antara data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber yang terlibat secara langsung dalam konteks penelitian, dengan data yang ditemukan melalui studi kepustakaan yang telah dilakukan sebelumnya. Data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber akan digunakan untuk mendapatkan perspektif dan pengalaman langsung dari mereka yang terlibat dalam konteks penelitian. Sementara itu, data yang ditemukan melalui studi kepustakaan akan memberikan landasan teoritis dan pengetahuan yang lebih luas tentang topik yang sedang diteliti.